



Laporan Kinerja

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2022





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 20 Maret 2023

INSPEKTUR,

DELLIYARTI SM, S.E, Ak, CA, CFA
Pembina Utama Madya
NIP.19641231 199303 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi dalam Laporan Kinerja disajikan secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis (indikator kinerja utama) yang diperjanjikan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

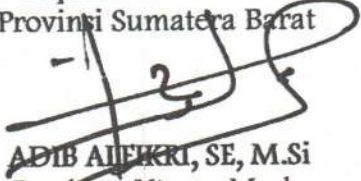
Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis atau 33,33% mencapai keberhasilan dengan kategori **Memuaskan**, 2 (dua) sasaran strategis 66,67% mencapai

keberhasilan dengan kategori Sangat Baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan selalu mengupayakan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) untuk peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2023
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



ADIB AIEKKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304131997031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian pada satu indikator kinerja utama menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Memuaskan**, satu indikator kinerja utama dan satu indikator kinerja penunjang menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Sangat Baik**. Pencapaian IKU pada sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dimana pencapaiannya mencapai **Rp. 5.201.734.930.000,-** pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pencapaian dengan Nilai Interval Konversi IKM sebesar **95,35** dengan Nilai Interval IKM sebesar **3,81** serta sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat, dengan pencapaian **BB** dengan nilai **79,63**.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ke depan yaitu ;

Pertama, Sasaran pertama IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat capaian kinerjanya **Sangat Baik**. Namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Penyusunan peta potensi peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Sumatera Barat.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA dan PMDN di Sumatera Barat, sehingga kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di

Sumatera Barat lebih meningkat.

Ketiga, meningkatkan sosialisasi terkait perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah.

Keempat, perlu meningkatkan koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota dan Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, maupun juga dengan Dinas Teknis, terkait pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ihtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Gambaran Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	4
1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	4
1.4.2. Struktur Organisasi	8
1.4.3. Sumber Daya Manusia	9
1.4.4. Anggaran	13
1.4.5. Inventarisasi Aset	16
1.4.6. Sarana dan Prasarana	17
1.5. Isu – Isu Strategis	18
1.6. Sistematika Penulisan	21
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Rencana Strategis	23
2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Sumatera Barat	23
2.1.2. Tujuan	26
2.1.3. Sasaran	26
2.1.4. Strategi	28
2.1.5. Kebijakan	29
2.1.6. Program Untuk Pencapaian Sasaran	30
2.2. Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	31
2.2.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	32

BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1.	Metodologi Pengukuran Kinerja	37
3.3.	Hasil Pengukuran Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	39
3.4.	Capaian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat .	41
BAB. IV	PENUTUP	89
LAMPIRAN		
1.	Perjanjian Kinerja	
2.	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
3.	Rencana Aksi dan Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
4.	Penghargaan Yang Diterima Tahun 2022	
5.	Cascading DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	
6.	Rekapitulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	10
Tabel 1.2.	Komposisi Golongan Pegawai DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	11
Tabel 1.3.	Daftar Pejabat Fungsional DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	13
Tabel 1.4.	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	14
Tabel 1.5.	Daftar Aset DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	16
Tabel 1.6.	Daftar Kendaraan Dinas DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	18
Tabel 2.1.	Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	27
Tabel 2.2.	Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	30
Tabel 2.3.	Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	32
Tabel 2.4.	Anggaran DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 2.5.	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 3.1.	Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja	38
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	40
Tabel 3.3.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	42
Tabel 3.4.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Strategis 1.1	44
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2020 – 2021 dan Target 2022	47
Tabel 3.6.	Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2022	48
Tabel 3.7.	Realisasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 2022	45
Tabel 3.8.	Realisasi PMA Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota Tahun 2022	51
Tabel 3.9.	Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Tahun 2022	52
Tabel 3.10.	Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi Tahun 2022	53
Tabel 3.11.	Posisi Sumatera Barat secara Nasional terkait realisasi PMDN tahun 2022	55

Tabel 3.12.	Posisi Sumatera Barat secara Nasional terkait realisasi PMA tahun 2022	56
Tabel 3.13.	Posisi Sumatera Barat secara Regional terkait realisasi PMDN tahun 2022	58
Tabel 3.14.	Posisi Sumatera Barat secara Regional terkait realisasi PMA tahun 2022	58
Tabel 3.15.	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat Tahun 2022	62
Tabel 3.16.	Kelas Interval Survei IKM	66
Tabel 3.17.	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2	67
Tabel 3.18.	Nilai Indeks Unsur Pelayanan Yang Diobservasi Tahun 2022	69
Tabel 3.19.	Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2021 – 2022 dan target 2023 Indikator Kinerja	70
Tabel 3.20.	Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Januari s.d Desember 2022	71
Tabel 3.21.	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75
Tabel 3.22.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	76
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi, Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021 – 2022 dan target 2023	77
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 – 2022 dan Target 2023	78
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Tahun	80
Tabel 3.26	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	83
Tabel 3.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	84
Tabel 3.28	Daftar Inovasi Daerah Tahun 2022	86

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Grafik 3.1 Lima Besar Negara yang Melakukan Investasi PMA	50
Grafik 3.2 Lima Besar Investasi PMDN berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota	54

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Halaman
8

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun Anggaran 2022.

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu azas umum penyelenggaraan Negara yang menentukan bahwa setiap dari kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara negara ditingkat Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan negara kepada masyarakat / rakyat dengan menyusun Laporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas pencapaian Tujuan dan Sasaran yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas apa yang telah dan seharusnya dicapai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang

berkesinambungan dimasa yang akan datang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. GAMBARAN UMUM DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT

1.4.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI & KEWENANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan indikator Jumlah Masalah Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya.
2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM

di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu.

3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP.
4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat.
5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan.
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

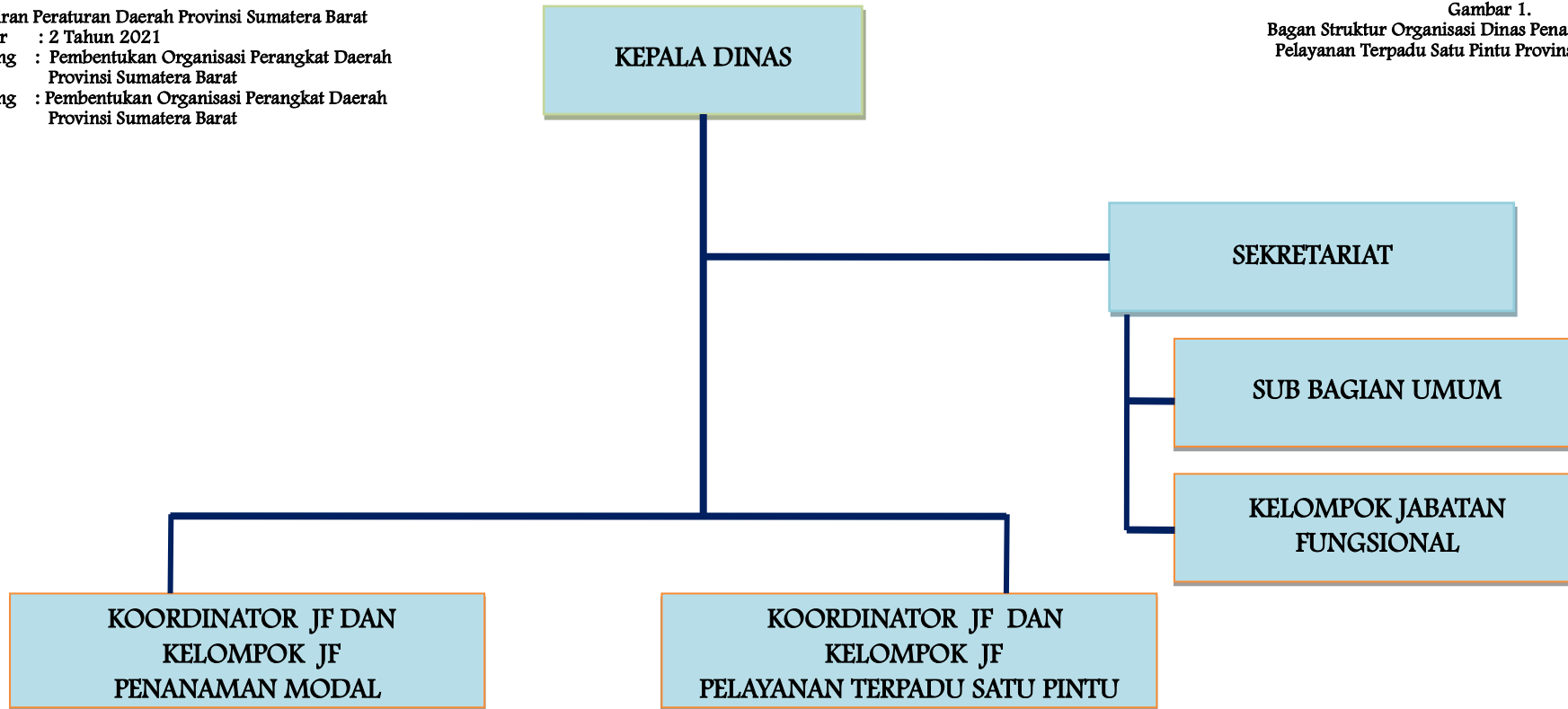
1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pada laporan kinerja ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang hingga Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bidang dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan kebawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 2 Tahun 2021
 Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
 Provinsi Sumatera Barat
 Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
 Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1.
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

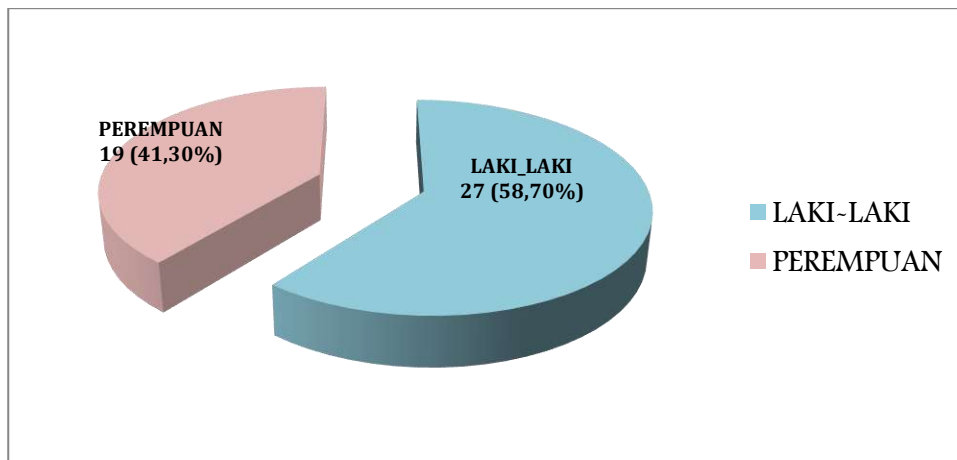


1.4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 46 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang (58,70%) laki-laki dan 19 orang (41,30%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

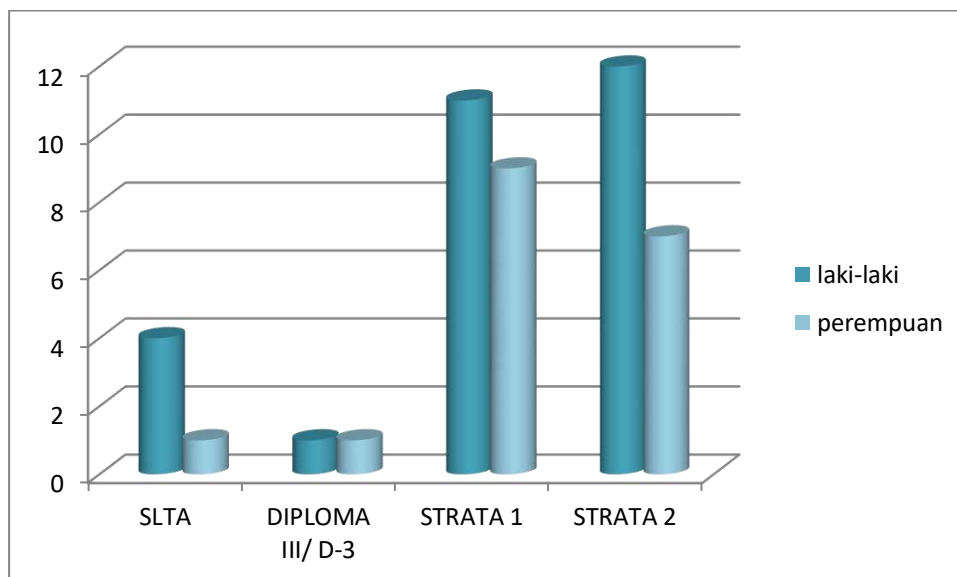
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	4	1	5	10,87%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	1	2	4,35%
4	STRATA 1	11	9	20	43,48%
5	STRATA 2	12	7	19	41,30%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	28	18	46	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 89,13% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 46,34% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

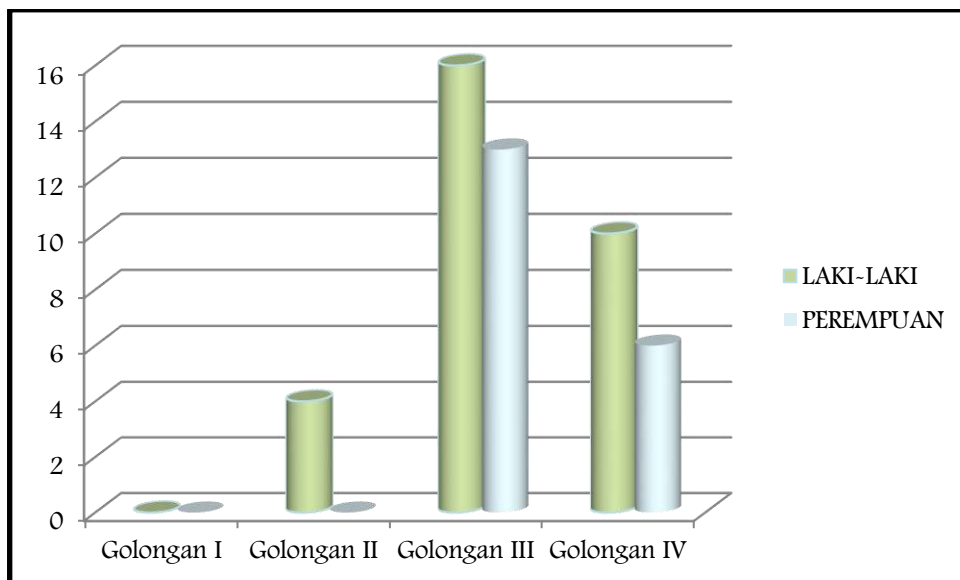
Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	4	1	5	10,87%
3	Golongan III	12	13	25	54,35%
4	Golongan IV	10	6	16	34,78%
	JUMLAH	26	20	46	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 89,13% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Sesuai dengan hasil penyetaraan yang dilakukan pada akhir tahun 2021 atas semua jabatan struktural yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Tabel 1.3.
Daftar Pejabat Fungsional DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Fungsional Analis Ahli Madya	1	2	3	15,80%
2	Fungsional Analis Ahli Muda	10	4	14	73,68%
3	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	-	1	5,26%
4	Fungsional Penterjemah Ahli Muda	-	1	1	5,26%
	JUMLAH	12	7	19	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

1.4.4. ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat dan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan total sebesar Rp. 13.362.219.389,- yang terdiri dari :

Belanja Daerah	: Rp. 13.362.219.389,-
a. Belanja Operasi	: Rp. 13.209.050.377,-
Belanja Pegawai	: Rp. 6.301.739.466,-
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 6.907.310.911,-
b. Belanja Modal	: Rp. 153.169.112,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 153.169.112,-

Terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.4
Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.387.061.458
A	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	195.748.908
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	90.888.658
2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	12.500.000
3.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	11.280.000
4.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD	12.500.000
5.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.716.785
6.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.863.465
B.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.479.904.266
7.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.110.354.266
8.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	187.383.000
9.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	126.767.000
10.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	55.400.000
C	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	20.000.000
11.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	20.000.000
D	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	210.226.908
12.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	67.350.000
13.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	81.558.908
14.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	61.318.000
E	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	733.688.309
15.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.040.000
16.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	93.198.412
17.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.511.633

18.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.774.962
19.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	17.080.000
20.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	549.083.302
F	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.970.700
21.	PENGADAAN MEBEL	59.970.700
G	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.136.122.501
22.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	23.862.934
23.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.024.000
24.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	912.235.567
H	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	551.399.866
25.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAPANGAN	269.193.250
26.	PEMELIHARAAN MEBEL	16.000.000
27.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	220.526.616
28.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.680.000
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAN MODAL	726.317.000
A	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MOAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	84.392.700
29.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	84.392.000
B	PEMBUATAN PETA POTENSI PELUANG INVESTASI PROVINSI	643.924.300
30.	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	90.341.350
31.	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI	547.582.950
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	729.123.550
A	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	729.123.550
32.	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	150.000.000
33.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	579.123.550
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.467.706.650
A	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	1.467.706.650
34.	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	996.886.100
35.	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PRIZINAN PENANAMAN MODAL	177.413.400
36.	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	293.407.150
A	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	996.522.731
37.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	996.522.731
38.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	8.840.000
39.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	730.295.885

06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	53.488.000
A	<i>URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI</i>	53.488.000
40.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	53.488.000
JUMLAH		13.362.219.389,-

1.4.5. INVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.611.186.433,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 6.131.783.633,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 479.402.800,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	-
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	2 unit 11 unit 13 unit 1 unit 276 unit 9 unit

	- Alat Kedokteran	2 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	-
III.	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1.	DED Gedung Kantor	1 unit

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

1.4.6. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas dan sampai saat ini menempati gedung milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, ruangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ruangan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, ruangan Bidang Promosi Penanaman Modal dan ruangan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat, ruang tunggu pelayanan, Mushala dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8

(delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.6
Daftar Kendaraan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	JENIS KENDARAAN	MERK	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBUATAN
1	2	3	4	5
1.	Mobil	Honda Accord	Operasional	2007
2.	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2002
3.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
4.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2012
5.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2018
6.	Mobil	Mitsubishi Triton	Operasional	2016
7.	Mobil	Mitsubishi Pajero	Operasional	2017
8.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
9.	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional	2018
10.	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional	2012
11.	Sepeda Motor	Honda	Operasional	2011

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah DPM & PTSP Tahun 2022

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026.

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu

diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim dan Minat Investasi;
2. Peningkatan Realisasi Investasi dengan Mempedomani Rencana Investasi;
3. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendukung Investasi;
4. Meminimalisir Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Calon Investor;
5. Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan (Tanah Ulayat) antara Masyarakat dengan Calon Investor;

6. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terkait dengan Perubahan Regulasi Perizinan;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung dan Ruang Pelayanan Perizinan DPM & PTSP; dan
8. Mengoptimalkan Proses Penerbitan Izin sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan.
9. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Keefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
10. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
11. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
12. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu diperhatikan agar daerah memiliki *positioning* yang lebih jelas berkaitan dengan potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan.

Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

1.6. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :
- a. Metodologi Pengukuran Kinerja
 - b. Hasil Pengukuran Kinerja
 - c. Capaian Kinerja DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja

dimaksud.

d. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan dan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang berisi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran DPM & PTSP, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2022.

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Sumatera Barat

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN “

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2026, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat Madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya

produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya Pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta Pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Misi 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Misi 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. **Misi 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;**
5. Misi 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;

6. Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. **Misi 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

2.1.2. TUJUAN

Tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdapat pada tujuan dari misi ke 4 dan misi 7 adalah **“Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah”** dan **“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Professional”**. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu **“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”** dengan Indikator Kinerja Tujuan **“Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi** dan **“Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani“** dengan Indikator Kinerja Tujuan **“Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”**.

2.1.3. SASARAN

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama : **“Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat“;**
Dengan indikator kinerja : **“Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN”;**

2. Sasaran Strategis kedua : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”**;

Dengan indikator kinerja : **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”**;

3. Sasaran Strategis ketiga : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”**;

Dengan indikator kinerja : **“Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”**;

Hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan dengan indikator kinerja serta sasaran strategis organisasi perangkat daerah beserta indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	2	3	4	5
Misi 4 : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”.				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 2 : “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”.				
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Pencapaian tujuan secara umum pelaksanaan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat, banyak melibatkan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah dalam meningkatkan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah.

Secara khusus berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

2.1.4. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat secara berkelanjutan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, telah menentukan strategi untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi, yaitu :
 - a. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
 - b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Sumatera Barat;

- c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;
 - d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal;
 - e. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM;
2. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan, yaitu ;
- a. Membuat Regulasi Teknis Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan izin-izin Strategis;
 - b. Menerapkan Pola Online System Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan;
 - c. Meningkatkan Kapasitas Aparatur PTSP;
 - d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

2.1.5.KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, yaitu:
 - a. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi dan peluang investasi dan pengolahan informasi peluang investasi;
 - b. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah;
 - c. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat melalui berbagai media.
 - d. Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;

- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap PMA & PMDN.
2. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik, yaitu :
 - a. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel;
 - b. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan.

2.1.6. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Adapun program – program yang dilaksanakan untuk mendukung masing – masing sasaran tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH PROGRAM	PROGRAM
1	2	3	
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	4 program	Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Program	Program Pelayanan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1 Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.2. PENETAPAN KINERJA DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2022 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2022, IKU dan APBD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah menetapkan Penetapan Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	6 %
1.1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.) Total (juta Rp.)	143.100 3.127.000 5.187.640
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,60/ 3,40
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,50)
2.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,50)

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

3.2.1. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 13.362.219.389,- yang digunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Anggaran DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	2	3	4
I.	BELANJA OPERASI	13.209.050.377,-	98,85 %
1.	Belanja Pegawai	6.301.739.466,-	47,16 %
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.907.310.811,-	51,69 %
II.	BELANJA MODAL	153.169.112,-	1,15 %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.169.112,-	1,15 %
JUMLAH BELANJA DAERAH		13.362.219.389,-	100,00 %

Alokasi anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.) Total (juta Rp.)	2.519.917.268,-	18,86 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.455.240.663,-	10,89 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	9.387.061.458,- (termasuk gaji dan tunjangan ASN)	70,25 %
TOTAL ANGGARAN			13.362.219.389,-	100,00 %

Sumber : DPA DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 13.362.219.389,- dengan persentase terbesar untuk mendukung sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** dengan anggaran sebesar Rp. 9.387.061.458,- atau sebesar 70,25% yang didalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN, kemudian untuk sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat** dengan anggaran sebesar Rp. 2.519.917.268,- atau sebesar 18,86% serta untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan anggaran sebesar Rp. 1.455.240.663,- atau sebesar 10,89% dari total anggaran belanja operasi dan belanja modal, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikator kerjanya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *web-monev* adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pencapaian 2 Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

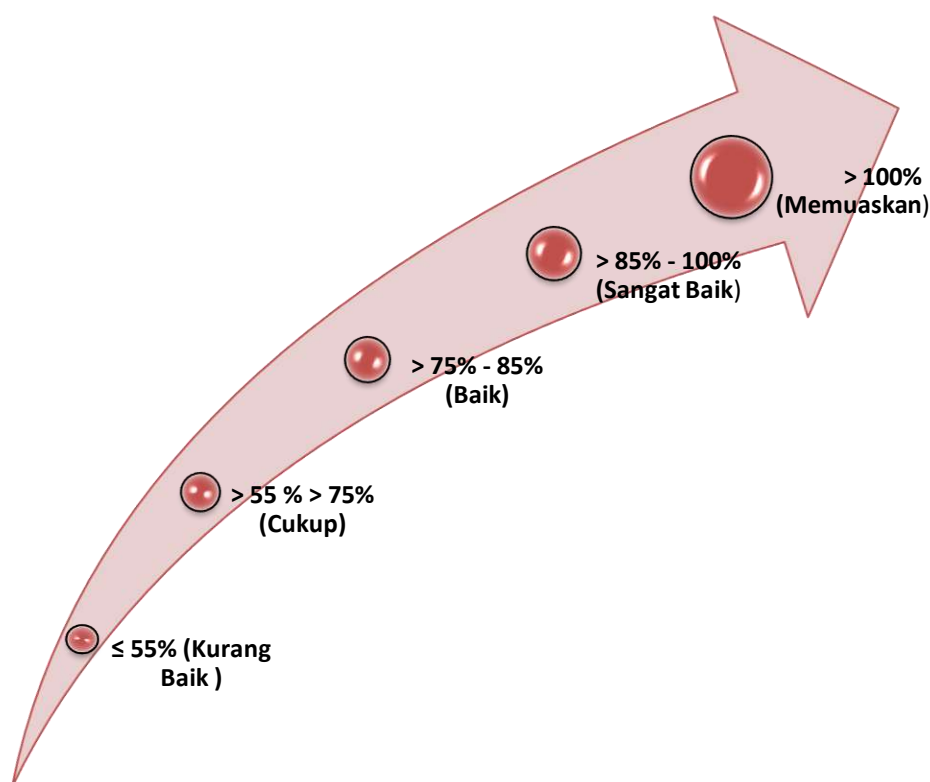
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sejalan dengan pencapaian sasaran gubernur serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan mulai dari **Kurang Baik** dengan capaian kinerja $\leq 55\%$ sampai **Memuaskan** dengan capaian kinerja $> 100\%$, sebagai berikut:



Hasil pengukuran capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan 2 (dua) indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama OPD dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja pendukung dapat dilihat dalam table 3.1., sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja
Pengukuran Kinerja
Tahun 2022

NO	KATEGORI KEBERHASILAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Memuaskan	2 Indikator Kinerja
2.	Sangat Baik	1 Indikator Kinerja
3.	Baik	-
4.	Cukup	-
5.	Kurang Baik	-

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian capaian kinerja dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (tiga) indikator kinerja tujuan serta 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis dimana 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	MISI/TUJUAN/	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	~	1.Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	6%	0,79%	13,17 %
		1.Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1.Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.) Total (juta Rp.)	143.100,00 3.127.000,00 5.187.640,00	141.780,18 3.167.188,71 5.201.734,93	99,08 % 101,29 % 100,27 %
		2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,60 / 3,40	95,35 / 3,81	115,44%/ 112,06%
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	~	2.Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,50)	A (80,50)	100,00 % 100,00 %
		3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3.Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,50)	A (80,50)	100,00 % 100,00 %

*) Oleshan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat 2022

Dari tabel 3.2 diketahui dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yakni 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) kinerja pendukung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dimana 2 (dua) indikator kinerja utama sasaran strategis dimana indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada level **Memuaskan** dengan hasil **95,35/3,81** dari target **82,60/3,40** dimana capaian kinerja **115,44/112,06** dan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN juga berada pada level **Memuaskan** dengan hasil Rp. 5.201.734,93 juta dari target Rp. 5.187.640,00 juta serta 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis **Sangat Baik** dengan hasil capaian kinerja **100%**, untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Dibandingkan dengan hasil capaian kinerja indikator kinerja tahun 2021, dimana hasil capaian kinerja dari indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2022 sebesar **100,27%** mengalami penurunan sebesar **5,19%** (**105,46%**) dan hasil capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar **112,06%** mengalami peningkatan sebesar **14,41** (**97,65%**).

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022.

Tujuan 1.1

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”

Pencapaian tujuan “ ***Meningkatnya Pertumbuhan Investasi*** “ dengan indikator kinerja “ ***Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi*** “ sesuai dengan RPJMD tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat bahwa dari realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan pada tabel 3.3, berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1
“ Meningkatkan Pertumbuhan Investasi “

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	6%	0,79%	13,17%	5,02%

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan pertama yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi diperoleh dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, kemudian dibagi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi} \\
 = & \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n} - \text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n-1}}{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n-1}} \times 100\% \\
 = & \frac{5.201.734.930.000,- - 5.161.169.300.000,-}{5.161.169.300.000,-} \times 100\% \\
 = & \frac{40.565.630.000,-}{5.161.169.300.000,-} \times 100\% \\
 = & 0,79\%
 \end{aligned}$$

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat diukur dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya yaitu Persentase Peningkatan

Investasi di Provinsi.

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2022 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar **6%** baru dapat direalisasikan sebesar **0,79%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **13,17%** termasuk kategori keberhasilan ***Kurang Baik***.

Realisasi kinerja tujuan pertama dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2022, yang terealisasi sebesar **0,79%** mengalami penurunan sebesar **4,23%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 dimana realisasi kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi adalah sebesar **5,02%**.

Tidak tercapainya indikator tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Daerah ini, disebabkan banyak faktor-faktor internal yang menyebabkannya, salah satu yang cukup signifikan adalah tidak jalannya pembangunan proyek jalan tol di Sumatera Barat yang direncanakan dapat berlanjut pada tahun 2022, padahal sudah masuk dalam perencanaan dalam penetapan target Persentase Peningkatan Investasi di provinsi.

Dalam rangka mencapai Tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi“, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yakni “***Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera***“ dengan indikator kinerja “***Nilai Realisasi Ivestasi PMA dan PMDN***” dan “***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu***” dengan indikator kinerja “***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***”.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dari kedua sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.1.

“ Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat “

Capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Realisasi Investasi di

Sumatera Barat “ dilihat berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, seperti tergambar dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.1.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN *)			
PMA (ribu US \$)	143.100,00	141.780,18	99,08 %
PMDN (juta Rp)	3.127.000,00	3.167.188,71	101,29 %
Total (Rp.)	5.187.640.000.000,00	5.201.734.930.000,00	100,27 %

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMTSP Provinsi Sumatera Barat

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat diperoleh dari membandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

=	$\frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi tahun n}} \times 100\%$
=	$\frac{5.201.734.930.000,-}{5.187.640.000.000,-} \times 100\%$
=	100,27%

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja **Memuaskan** sebesar 100,27%,

dimana Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2022, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar **Rp. 5.187.640.000.000,-** (lima triliun seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 5.201.734.930.000,-** (lima triliun dua ratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2022 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai realisasi investasi PMA, mengalami kenaikan sebesar **Rp. 40.565.630.000,-** dibandingkan tahun 2021 dimana nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar **Rp. 5.161.169.300.000,-**. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1

Nilai realisasi investasi ini terdiri dari PMA dan PMDN, dimana masing – masing pencapaian kinerjanya selama tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Realisasi dari Investasi PMA dari yang ditargetkan sebesar 143.000,- ribu US\$ dapat direalisasikan sebesar 141.780,18,- ribu US\$ dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{141.780,18}{143.100,-} \times 100\%$$

$$= 99,08\%$$

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMA tahun 2022 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dimana nilai realisasi investasi PMA mengalami kenaikan sebesar **74.831,18** ribu US\$ dibandingkan tahun 2021 dimana nilai realisasi investasi PMA sebesar **66.949,-** ribu US\$. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1

Sedangkan realisasi dari Investasi PMDN dari yang ditargetkan sebesar **Rp. 3.127.000.000.000,-** dapat direalisasikan **Rp. 3.167.188.710.000,-** dengan sebesar tingkat capaian kinerja **Memuaskan**. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN di Sumatera Barat diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMDN

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.167.188.710.000,-}{3.127.000.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 101,29\%$$

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2022 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dimana nilai realisasi investasi PMDN mengalami penurunan sebesar **Rp. 1.016.525.190.000,-** dibandingkan tahun 2021, dimana nilai realisasi investasi PMDN sebesar **Rp. 4.183.713.900.000,-**. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 seperti tergambar pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi, Capaian tahun 2022-2021
Dan Target 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET 2023
		2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN *)					
	PMA (ribu US \$)	66.949,00	141.780,18	49,59 %	99,08 %	154.550,00
	PMDN (juta Rp.)	4.183.713,90	3.167.188,71	141,82 %	101,29 %	3.377.150,00
	Total (juta Rp.)	5.161.169,30	5.201.734,93	105,46 %	100,27 %	5.602.670,00

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPITSP Provinsi Sumatera Barat

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2022 pencapaiannya sesuai dengan hasil capaian kinerja sebesar **100,27%** atau sebesar **Rp. 5.201.734.930.000** (lima triliun dua ratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini disebabkan oleh hal-hal:

1. Terlaksananya pengawasan / inspeksi langsung lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi rill dan laporan yang diberikan;
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan;
3. Adanya data – data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan;
4. Terbentuknya PIC yang bertanggungjawab dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota;
5. Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan dalam perizinan;
6. Tersedianya peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;
7. Adanya sistem verifikasi dan buru lapor kegiatan penanaman modal perusahaan (SERBU LKPM);
8. Adanya promosi berkelanjutan dan terintegrasi;
9. Adanya rancangan Peraturan Gubernur tentang Kemudahan Berusaha;

10. Adanya percepatan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari kab/kota se Sumatera Barat.

Kontribusi realisasi investasi PMA tahun 2022, berdasarkan sektor usaha, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Nilai Investasi PMA
Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2022

NO	SEKTOR USAHA MENURUT PERKA No. 17 Tahun 2015 BKPM RI	PENANAMAN MODAL ASING (PMA)	
		USD (ribu)	%
1	2	3	4
I.	Sektor Primer	27.457,03	19,37
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	11.289,25	7,96
2.	Kehutanan	-	-
3.	Perikanan	-	-
4.	Pertambangan	16.167,78	11,4
II.	Sektor Sekunder	99.414,26	70,12
5.	Industri Makanan	61.676,89	43,50
6.	Industri Tekstil	-	-
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-
8.	Industri Kayu	-	-
9.	Industri Kertas dan Percetakan	-	-
10.	Industri Kimia dan Farmasi	31.092,70	21,93
11.	Industri Karet dan Plastik	6.509,07	4,59
12.	Industri Mineral Non Logam	135,60	0,10
13.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	-	-
14.	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transporasi Lainnya	-	-
16.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	-	-
17.	Industri Lainnya	-	-
III.	Sektor Tersier	14.908,89	10,52
18.	Listrik, Gas dan Air	6.559,68	4,63
19.	Konstruksi	20,48	0,01
20.	Perdagangan dan Reparasi	454,86	0,32
21.	Hotel dan Restoran	139,77	0,10
22.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	6.215,81	4,38
23.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	569,36	0,40
24.	Jasa Lainnya	948,93	0,67
IV.	UMK	-	-
TOTAL		141.780,18	100,00

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.6 di atas, Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan sektor usaha pada tahun 2022, lima besar didominasi oleh sektor usaha industri Makanan sebesar USD 61.676,89,- ribu atau sebesar (43,50%), sektor usaha industri Kimia dan Farmasi sebesar USD 31.092,70 ribu atau sebesar (21,93%), kemudian disusul dengan sektor usaha Pertambangan sebesar USD 16.167,78 ribu atau sebesar (11,40%) usaha Tanaman Tangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar USD 11.289,25 ribu atau sebesar (11,27,966%), dan sektor usaha Listrik, Gas dan Air sebesar USD 6.559,68 ribu atau sebesar (4,63%).

Berdasarkan Negara, kontribusi Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Nilai Investasi PMA
Berdasarkan Negara
Tahun 2022 *)

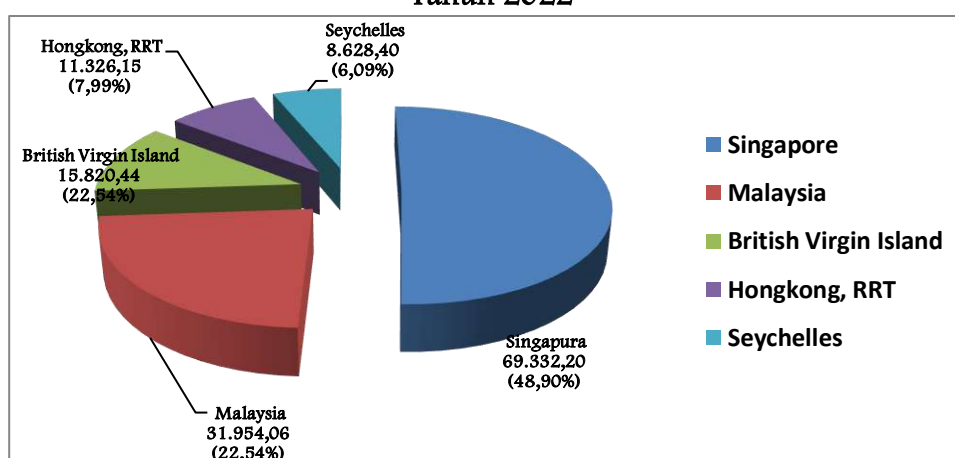
NO	NEGARA	NILAI INVESTASI (ribu USD)	%
1	2	3	4
1	SINGAPURA	69.332,20	48,90
2	MALAYSIA	31.954,06	22,54
3	BRITISH VIRGIN ISLANDS	15.820,44	11,16
4	HONGKONG, RRT	11.326,15	7,99
5	SEYCHELLES	8.628,40	6,09
6	BELANDA	596,96	0,42
7	JERMAN	88,80	0,06
8	R.R TIONGKOK	131,71	0,09
9	AUSTRALIA	36,63	0,03
10	BELGIA	-	-
11	INDIA	49,32	0,03
12	BRAZIL	452,95	0,32
13	PERANCIS	501,75	0,35
14	INGGERIS	1.702,45	1,20
15	AFRIKA SELATAN	2,90	0,00
16	KOREA SELATAN	46,09	0,03
17	SPANYOL	5,07	0,00
18	AMERIKA SERIKAT	205,36	0,14
19	SELANDIA BARU	-	-
20	NAMIBIA	0,70	0,00
21	MAURITIUS	697,08	0,49

22	IRLANDIA	0,70	0,00
23	PANAMA	3,84	0,00
24	SWEDIA	0,70	0,00
25	RUSIA	2,14	0,00
26	KANADA	20,34	0,01
27	UKRAINA	0,70	0,00
28	CAYMAN ISLAND	16,00	0,01
29	JEPANG	52,20	0,04
30	SLOVENIA	104,53	0,07
JUMLAH		141.780,17	100,00%

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMFTSP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.7 di atas, diperoleh informasi bahwa negara yang melakukan investasi dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat selama tahun 2022, lima besar adalah negara Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 69.332,20 ribu atau sebesar (48,90%), negara Malaysia dengan nilai investasi sebesar Rp. 31.954,06 atau sebesar (22,54%), negara British Virgin Island dengan nilai investasi sebesar USD 15.820,44 ribu atau sebesar (11,16%), kemudian disusul oleh negara Hongkong, RRT dengan nilai investasi sebesar USD 11.326,15 ribu atau sebesar (7,99%), dan negara Seychelles dengan nilai investasi sebesar USD 8.628,40 ribu atau sebesar (6,09%).

Grafik 3.1.
Lima Besar Negara Yang Melakukan Investasi PMA
Tahun 2022



Berdasarkan lokasi, kontribusi Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Nilai Investasi PMA
Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota
Tahun 2022

NO	LOKASI	NILAI INVESTASI (ribu USD)	%
1	2	3	4
1	Kota Padang	77.286,42	54,51
2	Kab. Pasaman Barat	21.711,23	15,31
3	Kab. Agam	17.301,94	12,20
4	Kab. Solok Selatan	11.024,50	7,78
5	Kab. Dharmasraya	7.649,31	5,40
6	Kab. Solok	1.719,56	1,21
7	Kab. Padang Pariaman	1.560,43	1,10
8	Kab. Sijunjung	1.279,70	0,90
9	Kab. Pesisir Selatan	873,75	0,62
10	Kab. Kep. Mentawai	714,12	0,50
11	Kab. Limapuluh Kota	334,20	0,24
12	Kab. Pasaman	211,40	0,15
13	Kab. Tanah Datar	39,30	0,03
14	Kota Bukittinggi	74,32	0,05
15	Kota Solok	0,00	0,00
16	Kota Sawahlunto	0,00	0,00
17	Kota Padang Panjang	0,00	0,00
18	Kota Payakumbuh	0,00	0,00
19	Kota Pariaman	0,00	0,00
TOTAL		141.188,18	100,00

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.8 diatas, diperoleh informasi bahwa lokasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbanyak lima besar adalah di Kota Padang dengan nilai investasi sebesar USD 77.286,42 ribu atau sebesar (54,51%), kemudian disusul dengan Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai investasi sebesar USD 21.711,23 ribu atau sebesar (15,31%), Kabupaten Agam dengan nilai investasi sebesar USD 17.301,94 ribu atau sebesar (12,20%), Kabupaten Solok Selatan dengan nilai investasi sebesar USD 11.024,50 ribu

atau sebesar (7,78%) dan Kabupaten Dharmasraya dengan nilai investasi sebesar USD 7.649,31 ribu atau sebesar (5,40%).

Sedangkan kontribusi PMDN berdasarkan sektor usaha, realisasi PMDN dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Nilai Investasi PMDN
Berdasarkan Sektor
Tahun 2022

NO	SEKTOR USAHA MENURUT PERKA No. 17 Tahun 2015 BKPM RI	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)	
		Rupiah (juta)	%
1	2	3	4
I.	Sektor Primer	1.152.441,38	36,387
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	664.618,66	20,98
2.	Kehutanan	166.397,40	5,25
3.	Perikanan	1.165,30	0,04
4.	Pertambangan	320.260,02	10,11
II.	Sektor Sekunder	551.314,36	17,41
5.	Industri Makanan	400.366,23	12,64
6.	Industri Tekstil	25,00	0
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	25,00	0
8.	Industri Kayu	34,30	0
9.	Industri Kertas dan Percetakan	17.330,89	0,55
10.	Industri Kimia dan Farmasi	23.021,34	0,73
11.	Industri Karet dan Plastik	561,80	0,02
12.	Industri Mineral Non Logam	108.183,90	3,42
13.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	133,80	0
14.	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transporasi Lainnya	1.123,00	0,04
16.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	409,10	0,01
17.	Industri Lainnya	100,00	0
III.	Sektor Tersier	1.463.432,97	46,21
18.	Listrik, Gas dan Air	246.662,10	7,79
19.	Konstruksi	222.310,53	7,02
20.	Perdagangan dan Reparasi	353.210,65	11,15
21.	Hotel dan Restoran	313.339,50	9,89
22.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	58.485,72	1,85
23.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	77.098,05	2,43
24.	Jasa Lainnya	130.838,37	4,13
IV.	UMK	61.488,05	1,94
TOTAL		3.167.188,71	100,00

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 3.9 Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan sektor usaha pada tahun 2022 lima besar didominasi oleh sektor usaha Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp. 664.618,66 juta atau sebesar (20,98%), kemudian disusul oleh sektor usaha makanan sebesar Rp. 400.366,23 juta atau sebesar (12,64%), sektor usaha perdagangan dan reparasi sebesar Rp. 353.210,65 juta atau sebesar (11,15%), sektor usaha pertambangan sebesar Rp. 320.260,02 juta atau sebesar (10,11%), sektor usaha hotel dan restoran sebesar Rp. 313.339,50 juta atau sebesar (9,89%

Berdasarkan Lokasi, kontribusi Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini sebagai berikut:

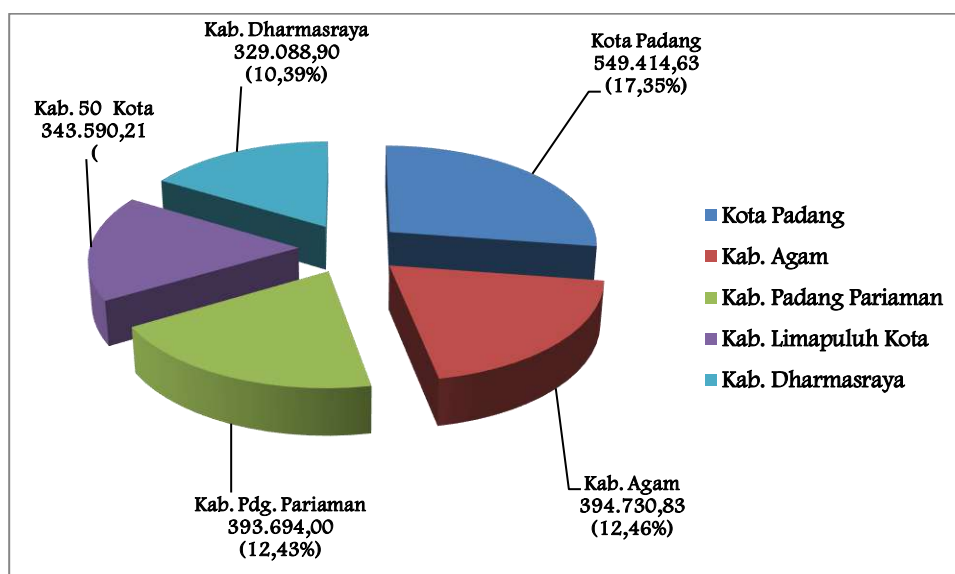
Tabel 3.10
Realisasi Nilai Investasi PMDN
Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota
Tahun 2022

NO	LOKASI	INVESTASI (juta Rp)	%
1	2	3	4
1	Kota Padang	549.414,63	17,35
2	Kab. Agam	394.730,83	12,46
3	Kab. Padang Pariaman	393.694,00	12,43
4	Kab. Limapuluh Kota	343.590,21	10,85
5	Kab. Dharmasraya	329.088,90	10,39
6	Kab. Solok Selatan	244.216,37	7,71
7	Kab. Pasaman Barat	211.147,28	6,67
8	Kab. Pesisir Selatan	180.106,60	5,69
9	Kab. Sijunjung	148.020,80	4,67
10	Kab. Solok	116.154,00	3,67
11	Kota Sawahlunto	113.959,87	3,60
12	Kab. Kep. Mentawai	29.486,80	0,93
13	Kota Payakumbuh	27.117,69	0,86
14	Kab. Pasaman	26.199,00	0,83
15	Kab. Tanah Datar	21.957,21	0,69
16	Kota Solok	13.422,10	0,42
17	Kota Bukittinggi	13.112,11	0,41
18	Kota Padang Panjang	6.279,60	0,20
19	Kota Pariaman	5.490,70	0,17
	TOTAL	3.167.188,71	100,00

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPITSF Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.10 diatas, diperoleh informasi bahwa lokasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbanyak lima besar adalah Kota Padang dengan nilai investasi sebesar Rp. 549.414,63 juta atau sebesar (17,35%), kemudian disusul dengan Kabupaten. Agam dengan nilai investasi sebesar Rp. 394.730,83 juta atau sebesar (12,46%), Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai investasi sebesar Rp. 393.694,00 juta atau sebesar (12,43%), Kabupaten 50 Kota dengan nilai investasi sebesar Rp. 343.590,21 juta atau sebesar (10,85%) dan Kabupaten Dharmasraya dengan nilai investasi sebesar Rp. 329.088,90 juta atau sebesar (10,39%).

Grafik 3.2
Lima Besar Investasi PMDN berdasarkan Lokasi Kabupaten/kota
Tahun 2022 *)



Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Melihat perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN, baik itu secara regional dan nasional posisi Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 masih berada di posisi terendah dalam realisasi investasi baik itu PMA maupun PMDN.

Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi, Provinsi Sumatera Barat berada diperingkat **ke 24**, dengan realisasi Investasi sebesar **Rp. 3.167,18 (milyar)**, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2021 turun 2 tingkat (peringkat 22), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Investasi PMDN
Tahun 2022

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	2	3	4
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	64.834,7	19.853
2	Jawa Barat	61.665,1	12.679
3	Jawa Timur	48.301,7	13.445
4	Riau	35.973,8	2.356
5	Kalimantan Timur	28.761,4	3.596
6	Banten	23.715,4	6.048
7	Sumatera Selatan	19.006,6	1.952
8	Sumatera Utara	18.565,4	4.425
9	Jawa Tengah	18.169,3	8.926
10	Kalimantan Selatan	8.429,1	1.441
11	Nusa Tenggara Barat	8.197,2	1.255
12	Kalimantan Barat	6.414,7	2.276
13	Jambi	6.017,9	1.633
14	Bengkulu	5.564,1	530
15	Sulawesi Selatan	5.434,8	2.608
16	Kalimantan Utara	5.381,6	390
17	Kalimantan Tengah	5.290,0	1.017
18	Kepulauan Bangka Belitung	5.059,0	766
19	Lampung	4.621,0	1.141
20	Sulawesi Tenggara	4.480,6	835
21	Bali	4.010,8	2.205
22	Kepulauan Riau	3.756,0	1.830
23	Aceh	3.532,3	1.865
24	Sumatera Barat	3.167,73	1.630
25	Maluku Utara	2.798,7	1.465
26	Sulawesi Tengah	2.755,0	1.330

27	Nusa Tenggara Timur	2.609,6	994
28	Sulawesi Utara	2.586,3	1.056
29	Papua Barat	1.428,8	440
30	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.325,2	1.603
31	Papua	902,7	558
32	Sulawesi Barat	707,7	183
33	Gorontalo	477,3	459
34	Maluku	352,5	867
TOTAL		414.294,00	103.657

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DFMTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan untuk Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi Provinsi Sumatera Barat berada diperingkat **ke 23** dengan realisasi Investasi sebesar **US\$. 141,78 (juta)**, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2021 naik 3 peringkat (peringkat 27), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Investasi PMA
Tahun 2022

NO	LOKASI	INVESTASI (US \$ Juta)	PROYEK
1	2	3	4
1	Sulawesi Tengah	5.134,9	189
2	Jawa Barat	4.648,6	5.65
3	Maluku Utara	3.275,0	102
4	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.070,8	7.221
5	Riau	2.503,0	300
6	Banten	2.301,4	1.971
7	Jawa Timur	2.171,0	1.841
8	Jawa Tengah	1.869,2	1.253
9	Sumatera Selatan	946.1	268
10	Papua	932.3	71
11	Sumatera Utara	909.7	677
12	Kalimantan Timur	867,3	442
13	Sulawesi Tenggara	702,8	91

14	Kepulauan Riau	660,1	930
15	Kalimantan Barat	583,6	319
16	Nusa Tenggara Barat	433,4	668
17	Kalimantan Tengah	360,8	217
18	Bali	324,2	3.538
19	Kalimantan Utara	323,9	60
20	Sulawesi Selatan	317,6	242
21	Lampung	153,7	180
22	Kalimantan Selatan	149,8	155
23	Sumatera Barat	141,78	176
24	Aceh	116,7	73
25	Kepulauan Bangka Belitung	110,9	119
26	Gorontalo	86,0	26
27	Sulawesi Utara	76,3	125
28	Maluku	63,5	36
29	Papua Barat	62,3	59
30	Nusa Tenggara Timur	48,3	241
31	Bengkulu	34,8	54
32	Daerah Istimewa Yogyakarta	34,8	241
33	Jambi	27	126
34	Sulawesi Barat	24,6	15
TOTAL		33.466,2	22.531

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DFMTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat *ke 10* dengan realisasi Investasi sebesar *Rp. 3.167,73 (Milyar)*, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2021 turun 1 tingkat (peringkat 9), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Investasi PMDN
Tahun 2022

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	2	3	4
1	Riau	35.973,8	2.356
2	Sumatera Selatan	19.006,6	1.952
3	Sumatera Utara	18.565,4	4.425
4	Jambi	6.017,9	1.633
5	Bengkulu	5.564,1	530
6	Kepulauan Bangka Belitung	5.059,0	766
7	Lampung	4.612,0	1.141
8	Kepulauan Riau	3.756,0	1.830
9	Aceh	3.532,3	1.865
10	Sumatera Barat	3.167,73	1.630
	TOTAL	105.263,8	18.128

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMA PMA Provinsi Sumatera Barat Se-Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat *ke 6*, dengan realisasi Investasi sebesar *US\$. 141,74 (juta)*, peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2021 naik 1 tingkat (peringkat 7), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Investasi PMA
Tahun 2022

NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	2	3	4
1	Riau	2.503,0	300
2	Sumatera Selatan	946.1	268
3	Sumatera Utara	909.7	677
4	Kepulauan Riau	660.1	930
5	Lampung	153.7	180
6	Sumatera Barat	141,73	176
7	Aceh	116.7	73
8	Kepulauan Bangka Belitung	110.9	119
9	Bengkulu	34.8	54
10	Jambi	27.0	126
TOTAL		5.535,7	2.903

Sumber : Olahan Rumpum Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang koordinasi yang lebih intens dengan kabupaten/kota terkait pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada perusahaan PMA dan PMDN yang berada di wilayahnya serta ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor, selain itu keberhasilan ini juga ditunjang dengan kebijakan yang mendukung terhadap peningkatan realisasi investasi penanaman modal diantaranya adalah: Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan dan kendala Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat, disamping yang dijabarkan diatas juga disebabkan oleh:

Internal:

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Penanaman Modal sesuai standar.
2. Masih terdapatnya Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai dengan regulasi yang baru.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Ekternal:

1. Banyaknya perusahaan bidang usaha ketenagalistrikan yang belum merealisasikan investasinya karena belum adanya kesepakatan harga pembelian dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan nilai rencana investasinya cukup besar.
2. Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.
3. Belum Clear and Cleannya Tanah lokasi untuk berinvestasi., disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat.
4. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB.
5. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.
6. Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Untuk meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta mengupayakan Tim Teknis yang ada di OPD Teknis agar berada di PTSP.
2. Sosialisasi kebijakan terkait dengan Regulasi Tanah Ulayat ke Masyarakat.
3. Pengembangan Sistem terkait Informasi Potensi dan Peluang Investasi serta Lokasi Investasi berbasis Teknologi Informasi.
4. Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Mempercepatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
6. Mendorong Provinsi, Kabupaten / Kota untuk melakukan revisi RTRW yang terbuka untuk Investasi.
7. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan)
8. Melakukan Sosialisasi Produk Hukum terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
9. Melakukan revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
10. Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
11. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

adalah sebesar Rp. 3.975.157.931,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.952.101.693,- atau sebesar 99,42%. Artinya masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Barat lebih tinggi dari realisasi anggaran.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong pencapaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN, seperti tampak dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Mendukung Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	722.317.000	720.621.892	99,78%
2.1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MOAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal	1 Ranpergub	1 Ranpergub	100%	84.392.700	84.208.500	99,78%
2.1.1	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITASI/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ▪ Tersedianya Kebijakan Penanaman Modal 	80 orang 1 ranpergub	80 orang 1 ranpergub	100% 100%	84.392.000	84.208.500	99,78%
2.2	PEMBUATAN PETA POTENSI PELUANG INVESTASI PROVINSI	Persentase Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi Yang Lengkap	100%	100%	100%	643.924.300	642.413.592	99,77%
2.1.1	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ▪ Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RUPM 	80 orang 1 dokumen	80 orang 1 dokumen	100% 100%	96.341.350	96.297.754	99,95%

2.1.2	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Status Tanah Ulayat yg Berpotensi untuk Penanaman Modal ▪ Dokumen Study Kelayakan Proyek Investasi ▪ Jumlah Pelaku Usaha yg Bermitra ▪ Jumlah Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ▪ Terlaksananya Pembinaan dan Dukungan terhadap Peta Potensi ▪ Terlaksananya Sosialisasi SIMITRA Terlaksananya FKPUD 	1 persil 1 dokumen 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 orang 100 orang	3 persil 1 dokumen 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 orang 100 orang	300% 100% 100% 100% 100% 100%	547.582.950	546.115.638	99,73%
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	4 Perny. Minat	7 Perny. Minat	175%	729.123.550	723.509.302	99,51%
3.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Keikutsertaan DPMPTSP dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 event	1 even	100%	729.123.550	723.509.302	99,51%
3.1.1	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	Tersedianya Materi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	150.000.000	149.935.850	99,96%
3.1.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terfasilitasinya Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi di Sumatera Barat ▪ Terlaksananya keikutsertaan DPMPTSP dalam Promosi Penanaman Modal Tersebarunya Informasi Penanaman Modal melalui Media Masa 	1 laporan 1 even 4 kali	1 laporan 1 even 4 kali	100% 100% 100%	579.123.550	573.573.452	99,39%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	5,1 T	5,2 T	59,60%	996.522.731	960.213.435	99,37%
5.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	5,1 T	5,2 T	59,60%	996.522.731	960.213.435	99,37%
5.1.1	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Koordinasi penanaman modal	1 laporan	1 laporan	100%	8.840.000	7.671.800	86,79%

5.1.2	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi Permasalahannya Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	10 PMA/ PMDN 450 orang	10 PMA/ PMDN 450 orang	100% 100%	730.295.885	704.188.525	99,61%
5.1.3	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	40 pelaku usaha	70 pelaku usaha	175%	257.386.846	248.353.110	99,13%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	20%	20%	100%	53.488.000	53.487.923	100%
6.1	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	20%	20%	100%	53.488.000	53.487.923	100%
6.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Yang Tersedia	1 Dokumrn	1 dokumen	100%	53.488.000	53.487.923	100%
TOTAL						2.501.451.281	2.457.832.552	99,46%

Sumber : Laporan Keuangan DPMPPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

*Sasaran Strategis 1.2**“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu “*

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu“ dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Teknik analisis data Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan, yakni dengan memberikan rentang skor antara 1 - 4. Skor 1 kriterianya apabila prosedur pelayanan tidak sederhana atau (tidak mudah). Skor 2 apabila prosedur pelayanan (kurang mudah), skor 3 (mudah) dan skor 4 (sangat mudah). Skor pada masing-masing unsur pelayanan itu dijumlahkan berdasarkan responden yang memberikan skor.

Kemudian tahap kedua dengan melihat nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dihitung dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang, dimana formulanya adalah setiap unsur pelayanan dari total unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus : Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur. Untuk nilai penimbang dalam survei di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah :

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur layanan yang bersifat online :

$$= 1/10$$

$$= 0,100$$

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur layanan yang bersifat offline :

$$= 1/17$$

$$= 0,059$$

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur layanan yang digunakan dalam perhitungan nilai SKM DPM & PTSP adalah dengan mengambil unsur yang sama untuk bisa digabungkan dalam perhitungan nilai bersama. Adapun jumlah unsur yang sama dari dua jenis layanan online dan offline sebanyak 9 unsur, sehingga dapat dihitung nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut :

$$= 1/9$$

$$= 0,111$$

Metode ketiga, yakni dengan melihat nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali dengan nilai penimbang yaitu 25.

Melalui 3 (tiga) metode itulah diketahui Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, setelah dikalikan dengan nilai penimbang 25, maka kinerja pelayanan dapat ditentukan sesuai dengan jumlah hasil perkalian dengan nilai pelayanan sesuai kelas interval dibawah ini :

Tabel 3.16
Kelas Interval Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017

Melalui 3 tahapan itulah diketahui hasil nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada semua jenis layanan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,60 / 3,40	95,35 / 3,81	115,44 / 112,06

Sumber : Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat DPMTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Level dan kategori pengukuran kinerja Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1.

Dari tabel 3.17 di atas terlihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja **Memuaskan** sebesar **115,44%/112,06%**

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperoleh dari membandingkan Realisasi Capaian kinerja tahun n dengan Target Kinerja tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Indikator Kinerja Nilai Interval Konversi Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Interval Konversi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n}}{\text{Target Nilai Interval Konversi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{95,35}{82,60} \times 100\%$$

$$= 115,44\%$$

Capaian Indikator Kinerja Nilai Interval Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Interval Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}}{\text{Target Nilai Interval Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,81}{3,40} \times 100\%$$

$$= 112,06\%$$

Terkait dengan indikator kinerja dari Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Penilaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tetap melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

Adapun tujuan dari survei ini adalah disamping untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan juga untuk mengetahui unsur – unsur apa saja yang harus ditingkatkan dan dipertahankan terkait komponen dalam IKM, sedangkan manfaat yang didapat adalah mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan.

Hasil pelaksanaan 2 kali survei diperoleh nilai unsur pelayanan, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, sebagaimana tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Nilai Indeks Unsur Pelayanan Yang Di Observasi
Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan Yang di Observasi	Nilai Interval IKM Unsur Pelayanan Yang Di Observasi		
		Semester 1	Semester 2	Jumlah Rata-Rata
1	2	3	4	5 = (3 + 4) / 2
1.	Persyaratan	0,442	0,444	0,443
2.	Prosedur Pelayanan	0,430	0,414	0,422
3.	Waktu pelayanan	0,432	0,412	0,422
4.	Biaya/tarif	0,443	0,443	0,443
5.	Produk layanan	0,435	0,421	0,428
6.	Kompetensi pelaksana	0,418	0,401	0,410
7.	Perilaku pelaksana	0,436	0,419	0,428
8.	Pungutan Tidak Resmi	0,424	0,425	0,425
9.	Penanganan Pengaduan	0,400	0,390	0,395
Nilai Interval IKM		3,860	3,767	3,814
Nilai Interval Konversi IKM		3,860 x 25	3,767 x 25	3,814 x 25
Nilai Interval Konversi IKM		96,500	94,175	95,35

Sumber : Bidang FKPL DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Dari tabel 3.18 di atas unsur pelayanan terkait dengan Penanganan Pengaduan untuk pelaksanaan 2 kali survei yang 3, dilaksanakan harus menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, karena masih dianggap kurang baik hasil surveinya dengan hasil sebesar **0,395** dari 8 (delapan) unsur pelayanan yang dinilai oleh penerima hasil layanan yang hasilnya sudah diatas **0,4000**.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan tahun 2021, digambarkan pada tabel 3.19

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi, Capaian tahun 2021-2022
Dan Target 2023 Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET 2023
		2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,02 / 3,32	95,35 / 3,81	100,51 / 97,65	115,44 / 112,06	82,75 / 3,41

Dari tabel 3.19 dapat dilihat indikator kinerja capaian kinerja indikator kinerja nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target Nilai Interval Konversi IKM **82,60** terealisasi sebesar **95,35** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **115,44%** dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar **14,93%** (**100,51%**), sedangkan untuk Nilai Interval IKM dari target sebesar **3,40** dapat direalisasikan sebesar **3,81** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **112,06%** dibandingkan dengan tahun 2021 tingkat capaian kinerja ini mengalami kenaikan yang cukup drastis yakni sebesar **14,44%** (**97,65%**).

Pencapaian target survei indeks kepuasan masyarakat ini sangat bergantung kepada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat khususnya sub rumpun Pelayanan Terpadu satu Pintu. Selama tahun 2022 jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu, dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2022

NO	SEKTOR PERIZINAN	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS BERESIKO	PERIZINAN BERUSAHA NON OSS	PERIZINAN NON BERUSAHA	NON PERIZINAN	JUMLAH	TEPAT WAKTU PTSP (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PERIKANAN DAN KELAUTAN	519	-	-	-	519	99%
2	KEHUTANAN	8	-	-	60	68	70%
3	KESEHATAN	29	-	-	1	30	85%
4	PERHUBUNGAN	16	-	-	135	151	80%
5	KETENAGAKERJAAN	7	-	-	2	9	70%
6	PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
7	PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-
8	PERTANIAN	27	-	-	-	27	80%
9	PENDIDIKAN	-	-	48	-	48	65%
10	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	56	56	90%
11	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	78	71	-	-	149	80%

12	BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	14	9	-	-	23	70%
13	PSDA	-	1	-	-	1	0%
14	SOSIAL	-	-	16	14	20	0%
15	PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN	-	-	-	-	-	0%
16	PARIWISATA	47	-	-	-	47	0%
17	LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	18	18	0%
18	KOPERASI DAN UMKM	2	-	-	-	2	0%
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	843	843	99%
	JUMLAH	747	81	64	1.129	2.011	85%
	TOTAL		892		1.129	2.011	85%

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2022

Hambatan dan kendala Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkait penerbitan disebabkan oleh:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;
2. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
4. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
5. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
6. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka.

Untuk meningkatkan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Aturan – Aturan yang selalu Berubah dengan Mengadakan Layanan Langsung kepada Pelaku Usaha;
2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD Teknis Terkait;
3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian / Lembaga terkait;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD melalui Tim Teknis atau penyelenggara perizinan Provinsi Sumatera Barat;
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato terhadap perizinan yang tidak diatur pada OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp. 1.467.706.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.455.240.663,- atau sebesar 99,21%. Artinya masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tinggi dari realisasi anggaran yakni sebesar 115.44%.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Mendukung Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,60 / 3,40 85%	95,60 /3,83 85%	115,74/ 112,65 100%	1.467.706.650	1.455.240.663	99,15%
4.1	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,60 / 3,40 85%	95,60 /3,83 85%	115,74/ 112,65 100%	1.467.706.650	1.455.240.663	99,21%
4.1.1	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan Terlaksananya Forum PTSP Terlaksananya Koordinasi Teknis PTSP	1 sistem 2000 izin 85 orang 60 orang	1 sistem 2011 izin 85 orang 60 orang	100% 100,55% 100% 100%	996.886.100	988.273.501	99,23%
4.1.2	PEMANTAUAN KEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Laporan Audit Mutu Pelayanan tahun ke empat Terfasilitasinya NIB yang Berkomitmen agar Merealisasikan Izinnya Terlaksananya Survei IKM	1 kali 1 laporan 2 kali	1 kali 1 laporan 2 kali	100% 100% 100%	177.413.400	177.183.850	99,87%
4.1.3	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Terfasilitasinya izin SIPSAKATO yg tidak sesuai dengan SOP Terfasilitasinya/Termediasinya Pengaduan Izin Yang Bermasalah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	10 izin 10 pengaduan 1 kali	10 izin 10 pengaduan 1 kali	100% 100% 100%	293.407.150	289.783.312	98,76%

*Tujuan 2***“Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani “**

Tujuan kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani, memiliki 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sama dengan indikator kinerja tujuan Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani, dimana pencapaian indikator tujuan maupun indikator sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel 3.22, berikut:

Tabel 3.22

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2
“Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani “**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Target Tahun 2023
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,50)	BB (79,63)	98,91%	A (81)
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,50)	BB (79,63)	98,91%	A (81)

Dari tabel 3.22 di atas terlihat bahwa hasil capaian dari indikator kinerja pertama Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2022 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan A dengan Nilai 80,50, dan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan BB dengan nilai 79,64 dengan level capaian kinerja Sangat Baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,93%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun 2023,

seperti digambarkan pada tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Strategis
Tahun 2021-2022 dan Target 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN KINERJA		Target 2023
			2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79,39)	A (80,50)	100%	100%	A (81)
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79,39)	BB (79,64)	98,93%	100%	A (81)

Capaian Kinerja dari indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, nilainya mengalami kenaikan sebesar **0,25** dibandingkan capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yang sebesar **79,39**. Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak sesuai dengan yang ditarget dengan nilai **A** baik itu dari tujuan maupun sasaran strategis dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

1. Komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilakukan untuk melihat sampai dimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja
3. Penegakan pemberian reward dan punishment berupa pengurangan tambahan penghasilan kepada beberapa aparatur.

Perbandingan hasil penilaian dari laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan tahun 2021, berdasarkan kategori akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat dilihat dalam tabel 3.24 berikut ini:

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021-2022 dan Target 2023

N O	KATEGORI	BOBOT	REALISASI		CAPAIAN		TARGET 2023
			2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	25,68	26,42	100%	102,88%	26,24
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	21,15	21,08	100%	99,66%	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	13,56	11,64	100%	85,84%	13,66
4.	Evaluasi Internal	10 %	7,96	20,50	100%	257,53%	8,16
5.	Pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi	20 %	11,04	-	100%	-	11,04
Total		100 %	79,39	79,64	100%	98,93%	81,00

Dari tabel 3.24 diatas , dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) kategori evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari 5 (lima) kategori mencapai hasil yang *Sangat Baik*.

Hambatan peningkatan implementasi SAKIP tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1. Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dan staf dalam menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja masih belum terintegrasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP, adalah:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan:

- a. Melakukan pembahasan cascading kinerja dan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan kinerja).
 - b. Melakukan keselarasan indikator kinerja yang ada dengan dokumen perjanjian kinerja dengan SKP
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai Perjanjian Kinerja level Staf
 3. Penyusunan SKP sudah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja
 4. Monitoring pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar **Rp. 3.276.707.192,-** di luar pagu anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN dan terealisasi sebesar **Rp. 3.228.609.864,-** atau sebesar **98,53%**.

Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Hal ini tampak dari persentase capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **100%** lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar **98,53%** (tingkat efisien sebesar **1,47%**).

Anggaran sebesar **Rp. 3.276.707.192,**tersebut tersebar pada 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dan Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian tujuan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut ini:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022						
			TARGET	FISIK			KEUANGAN		
				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	9.387.061.458	8.954.493.935	95,99	
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 %	85 %	100%	195.748.908	195.775.050	98,99	
1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	90.888.658	89.392.200	98,35	
1.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	12.500.000	12.500.000	100,00	
1.1.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	11.280.000	11.246.050	99,70	
1.1.5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	12.500.000	12.484.900	99,88	
1.1.6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	33.716.785	33.623.400	99,72	
1.1.7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan DPMPTSP yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	34.863.465	34.528.500	99,04	
1.2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.479.904.266	6.090.770.363	93,99	
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	52 orang	52 orang	100%	6.110.354.266	5.725.884.071	93,71	
1.2.2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	14 orang	14 orang	100%	187.383.000	187.098.300	99,83	
1.2.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	126.767.000	124.479.892	98,20	

1.2.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTER SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	13 dokumen	13 dokumen	100%	55.400.000	53.308.100	96,22
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.000.000	19.745.000	98,73
1.3.1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%	20.000.000	19.745.000	98,73
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	210.226.908	206.702.290	98,32%
1.4.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pengadaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri 	49 Stel 51 Stel	49 Stel 51 Stel	100% 100%	67.350.000	64.350.000	95,55%
1.4.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	60 orang	60 orang	100%	81.558.908	81.278.899	99,66%
1.4.3	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah ASN DPMPTSP Yang Mengikuti BIMTEK	12 orang	12 orang	100%	61.318.000	61.073.391	99,60%
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	733.688.309	723.897.724	99,28%
1.5.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	100%	29.040.000	29.038.500	99,99%
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	13 unit	13 unit	100%	93.198.412	88.417.000	94,87%
1.5.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan ▪ Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang Dilakukan 	34 jenis 22 kali	34 jenis 22 kali	100% 100%	29.511.633	29.482.700	99,90%
1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Penyediaan Barang Cetak ▪ Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 	9 jenis 21.358 lbr	9 jenis 21.358 lbr	100% 100%	15.774.962	15.774.750	100%
1.5.5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	6 jenis	6 jenis	100 %	17.080.000	17.080.000	100%
1.5.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ▪ Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan untuk Pertemuan 	59 dokumen 440 kotak	59 dokumen 440 kotak	100% 100%	549.083.302	544.104.774	99,92%

1.7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100%	59.970.700	59.306.800	98,89%
1.7.1	PENGADAAN MEBEL	Jumlah Pengadaan Mebel	17 unit	17 unit	100%	59.970.700	59.306.800	98,89%
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.136.122.501	1.104.993.301	97,29%
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam 1 Tahun	400 surat	600 surat	150%	23.862.934	23.497.300	98,47%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Tagihan Listrik yang dibayarkan ▪ Rekening Tagihan Telepon Yang Dibayarkan ▪ Jaringan Internet Yang disediakan 	41500KVA 3 rek 1 paket	41500KVA 3 rek 1 paket	100% 100% 100%	200.024.000	173.793.976	86,89%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan ▪ Jumlah Jasa Tenaga Sopir ▪ Jumlah Jasa Tenaga Pengaman ▪ Jumlah Jasa Rohaniwan 	5 org 5 org 4 org 10 kali	5 org 5 org 4 org 10 kali	100% 100% 100% 100%	912.235.567	907.702.025	99,54%
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100%	100%	100%	551.399.866	384.867.407	99,83%
1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	11 unit	11 unit	100%	269.193.250	268.543.383	99,76%
1.9.2	PEMELIHARAAN MEBEL	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	200 unit	200 unit	100%	16.000.000	15.994.200	99,96%
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain Yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%	220.526.616	220.414.824	99,95%
1.9.4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	96 unit	96 unit	100%	45.680.000	45.515.000	99,64%
TOTAL						9.387.061.458	8.954.493.935	95,39%

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan capaian kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 jika diperbandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, dapat terlihat pada tabel 3.26.

Realisasi kinerja tujuan pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2022, dengan realisasi sebesar **0,79%** dengan capaian kinerja sebesar **13,17%**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi kinerja tujuan pertama ini jauh mengalami penurunan yakni sebesar **4,23% (5,02%)**.

Banyak faktor yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat tahun 2022 ini, salah satunya disebabkan kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, sehingga pelaku usaha yang akan melakukan perluasan dan pengembangan usahanya banyak yang belum terbit izinnya dari pusat dengan sendirinya penambahan investasi yang akan dilakukan terpaksa ditunda.

Tujuan pertama ini memiliki dua Sasaran Strategis, dimana sasaran strategis pertama Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja nilai realisasi PMA dan PMDN yang dapat direalisasikan sebesar Nilai sebesar **5.201.734.930.000,-** atau sebesar **100,27%** dari yang ditarget yang diperjanjikan dalam perjanjian sebesar **Rp. 5.187.640.000.000,-**. Dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2021, realisasi kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera mengalami peningkatan sebesar **Rp. 40.565.630.000,-** (**Rp. 5.161.169.300.000,-**).

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN ditahun 2022 ini adalah:

1. Terlaksananya pengawasan / inspeksi langsung lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi rill dan laporan yang diberikan;
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan;
3. Adanya data – data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan;

Sasaran strategis kedua dari tujuan Meningkatnya Pertumbuhannya Investasi di Sumatera Barat, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat direalisasikan dengan Nilai Interval IKM sebesar **95.35** dan Nilai Interval Konversi IKM sebesar **3.81** dengan capaian kinerja sebesar **115,44% /112,06%**, hasil ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana capaian kinerjanya hanya sebesar **100,51%/97,65%**.

Pencapaian tujuan kedua Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani memiliki indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dengan realisasi sebesar **80,50** dengan nilai **A** sesuai dengan target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **1,11** dibandingkan capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 yang sebesar **79,39**.

Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang ditarget dengan nilai **A** baik itu dari tujuan maupun sasaran strategis dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

1. Komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilakukan untuk melihat sampai dimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja

4. Penegakan pemberian reward dan punishment berupa pengurangan tambahan penghasilan kepada beberapa aparatur.
seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD
Tahun 2021-2026.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		TARGET 2023
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	6%	6%	5,02%	0,79%	83,67%	13,17%	8,5%
		Meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Total PMA (ribu US \$) PMDN (juta Rp.)	Juta Rp. ribu US \$ juta Rp.	4.894.000 135.000 2.950.000	5.187.640 143.100 3.127.000	5.161.169,30 66.949,00 4.183.713,90	5.201.734,29 141.780,18 3.167.188,71	105,46% 49,592% 141,82,%	100,27% 99,08% 101,29%	5.602.670 154.550 3.377.150
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	83,02 / 3,32	95,35 / 3,81	100,51% / 97,65%	115,44% / 112,06%	82,75 / 3,41
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80 / BB	80,50 / A	79,39 / BB	79,64 / BB	99,24 / BB	98,93%	81 / A

Analisa Efisiensi

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Tabel 3.27
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (juta)	Realisasi (juta)	% Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	5.187.640,-	5.201.734,29	100%	2.501.451.281	2.457.832.552	99,46%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,60/ 3,40	95,35/ 3,81	115,44%/ 112,06%	1.467.706.650	1.455.240.663	99,15%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,50 / A	79,64 / BB	98,93%	3.276.707.192	3.228.609.864	98,53%

Tabel di atas menjelaskan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih dari 100%. Untuk sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, telah mencapai kinerja sebanyak 100,27% dengan realisasi anggaran sebesar 99,46% dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai standar pelayanan publik kinerjanya mencapai 115,44%/112,06% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,15% dari besarnya total anggaran, serta untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, telah mencapai kinerja sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,53% dari total anggaran yang dialokasikan diluar belanja gaji dan tunjangan ASN..

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.27 di bawah ini :

Tabel 3.28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Total (juta Rp.)	101,27%	99,46%	1,81%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	115,44%/ 112,06%	99,15%	14,6%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100%	98,53%	1,47%

INOVASI

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.

Untuk memacu peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan

publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pada umumnya terkhusus untuk para investor dan pelaku usaha, terus melakukan inovasi – inovasi dalam pelayanannya sehingga pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai **juara 3 (tiga)** tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, **peringkat 3 (tiga)** tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah terbanyak Jumlah Penerapan Inovasi, serta **peringkat 4 (empat)** sebagai Organisasi Perangkat Daerah Terinovatif. Adapun inovasi – inovasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, diantaranya :

Tabel 3.28
DAFTAR INOVASI DAERAH
Tahun 2022

No	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Kematangan
1	Intensifikasi Perizinan Prioritas Bagi UMK (INTIP UMK)	Penerapan	penanaman modal	01/01/2021	29/01/2021	97.00
2	Pelayanan Satu Hari (NAN SARI)	Penerapan	penanaman modal	01/02/2021	22/02/2021	93.00
3	SMS Gate Way	Penerapan	penanaman modal	07/11/2020	18/12/2020	99.00
4	Sakato Sign (Sistem Penandatanganan Elektronik)	Penerapan	penanaman modal	20/11/2020	18/12/2020	93.00
5	SIP SAKATO (Sistim Informasi Perizinan Sakato)	Penerapan	penanaman modal	01/12/2020	01/01/2021	93.00
6	MOBILE TRACKING	Penerapan	penanaman modal	01/01/2020	07/01/2020	96.00
7	IPIN24 (Informasi dan Konsultasi Perizinan 24 jam)	Penerapan	penanaman modal	10/05/2021	17/06/2021	94.00
8	NAN MAKNYOSS (PELAYANAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION)	Penerapan	penanaman modal	01/01/2021	01/03/2021	96.00
9	SI WALI (SAHABAT IZIN WALI NAGARI)	Penerapan	penanaman modal	02/02/2021	02/02/2021	91.00
10	Duta Investasi	Penerapan	penanaman modal	24/08/2020	22/12/2020	96.00
11	JANGAN PANIK (Jaringan Perizinan Berbasis NIK)	Penerapan	penanaman modal	16/12/2019	02/01/2020	98.00
12	inLOVEST Sumbar	Penerapan	penanaman modal	03/08/2020	17/09/2020	94.00
13	JANJI TEMU (Gelar Potensi dan Temu Usaha)	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	26/11/2020	91.00
14	IKM Real Time	Penerapan	penanaman modal	05/10/2020	23/11/2020	88.00
15	SIPOPEI (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi)	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	21/12/2020	97.00
16	NASI PEPEZ (Layanan Sistim Informasi Permasalahan Perizinan)	Penerapan	penanaman modal	03/11/2020	28/12/2020	90.00
17	SIMITRA (Sistem Informasi Mitra Usaha)	Penerapan	penanaman modal	03/11/2019	04/02/2020	92.00

18	Serbu LKPM (Sistem Verifikasi dan Buru Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Penerapan	penanaman modal	04/11/2020	21/01/2021	94.00
19	SADAR IZIN	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	15/12/2020	56.00
20	TAXI CEPAT (Tax Clearance Integrasi Perizinan dan Samsat)	Penerapan	penanaman modal	01/12/2019	01/01/2020	96.00
21	KEPALA KAKAP (Kepastian Pelayanan Langsung Bersama Penerbitan Izin Sektor Perikanan Tangkap)	Penerapan	penanaman modal	02/11/2020	01/12/2020	96.00

PENGHARGAAN

Untuk memberikan apresiasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian Investasi BKPM RI melakukan penilaian atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah tahun 2022 bagi semua Pemerintahan Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten / Kota maupun Kementerian dan Lembaga tingkat Pusat.

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum berhasil meningkatkan peringkatnya atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah.

Disamping itu untuk tingkat daerah, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 mendapat penghargaan di tingkat daerah Provinsi sebagai peringkat **juara 3 (tiga)** tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam **Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik** , **peringkat 3 (tiga)** tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai **Organisasi Perangkat Daerah terbanyak Jumlah Penerapan Inovasi**, serta **peringkat 4 (empat)** sebagai **Organisasi Perangkat Daerah Terinovatif**.

BAB IV PENUTUP

Memenuhi maksud Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 1 (satu) tujuan daerah yang diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, juga memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang diukur oleh 3 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun 2021 – 2026 perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

3. Untuk pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama OPD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.975.157.931,- atau sebesar 29,75% dari total anggaran belanja tahun 2022 (Rp. 13.362.219.389,-) dengan realisasi sebesar Rp. 3.951.101.693,- (99,39%).
4. Tujuan pertama yang menjadi Indikator Kinerja Daerah “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi masih belum menampakkan kinerja yang bagus sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebesar 6%, direalisasikan dengan hasil **Kurang Baik**, karena capaian kinerjanya hanya 8,50% atau (0,51%).
5. Tujuan kedua “**Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani**” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD” dengan hasil kinerja **Sangat Baik** dengan capaian kinerja sebesar 98,93% dengan hasil **BB (79,64)** dari target direncanakan **A (80,50)**.
6. Kategori keberhasilan dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator, adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil **Memuaskan**, karena capaian kinerjanya >100%, yakni sebesar 115,16% dan 112,06%.
 - b. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni “Nilai Realisasi Investasi PMDA dan PMDN” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil **Sangat Baik**, karena capainnya kinerjanya 100%.

- c. 1 (satu) Indikator Kinerja OPD, yakni “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil **Sangat Baik**, karena capainnya kinerjanya 100%.

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

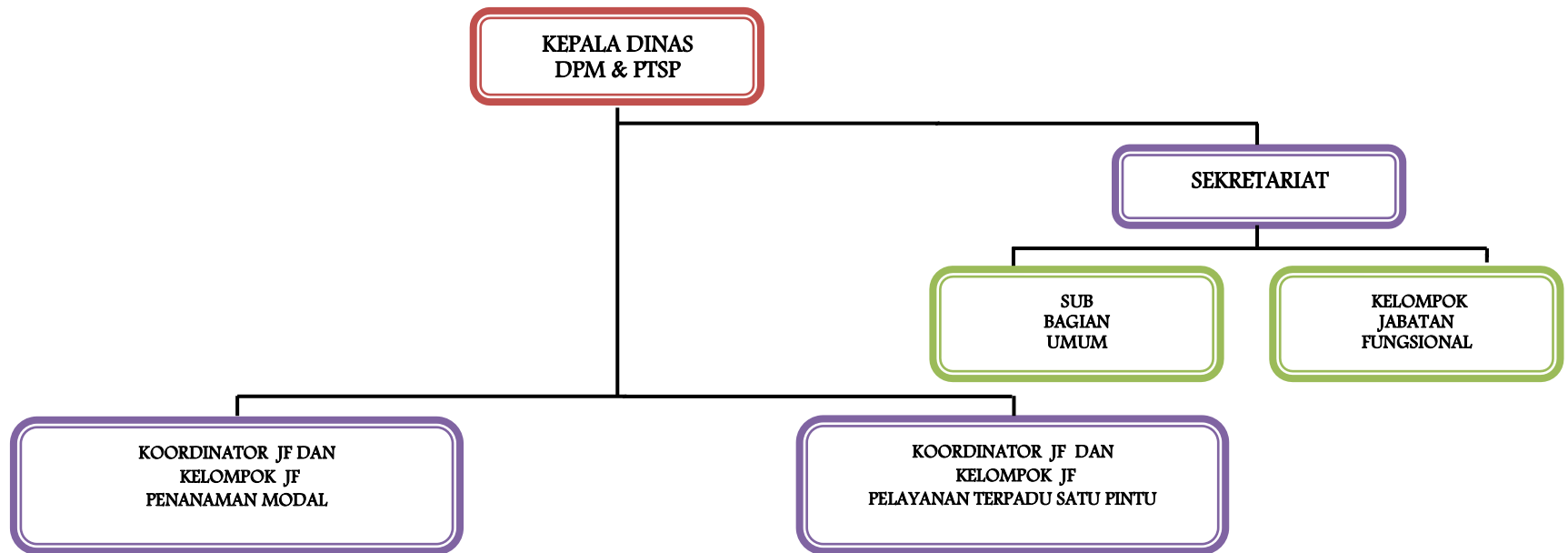
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai *stakeholders*. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Penyederhanaan jenis perizinan dan prosedur penyelenggaraan perizinan perubahan dari berbasis perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha yang sudah dikelompokkan dalam KBLI;
2. Kewajiban pemberian layanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan NSPK;

3. Melakukan penyesuaian pada nomenklatur DPMPTSP sesuai dengan ketentuan pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan tidak merumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya;
4. Kewajiban bagi DPMPTSP untuk menggunakan/menerapkan Online Single Submission (OSS);
5. Melakukan penyesuaian peraturan kepala daerah terkait tentang pendelegasian kewenangan perizinan berbasis OSS dan RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Penyusunan RTRW dan RDTR digital dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
7. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan serta Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Monitoring dan evaluasi serta Pengawasan secara ketat dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko baik pada saat maupun pasca perizinan berusaha berisiko;
9. Mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat;
10. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
11. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran.

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	9.387.061.458	8.954.493.935	95,39
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 %	85 %	100%	195.748.908	195.775.050	98,99
1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	90.888.658	89.392.200	98,35
1.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	12.500.000	12.500.000	100,00
1.1.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	11.280.000	11.246.050	99,70
1.1.5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	12.500.000	12.484.900	99,88
1.1.6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	33.716.785	33.623.400	99,72
1.1.7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan DPMPTSP yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	34.863.465	34.528.500	99,04
1.2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.479.904.266	6.090.770.363	93,99
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	52 orang	52 orang	100%	6.110.354.266	5.725.884.071	93,71
1.2.2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	14 orang	14 orang	100%	187.383.000	187.098.300	99,83
1.2.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	126.767.000	124.479.892	98,20
1.2.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTER SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	13 dokumen	13 dokumen	100%	55.400.000	53.308.100	96,22

1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.000.000	19.745.000	98,73
1.3.1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%	20.000.000	19.745.000	98,73
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	210.226.908	206.702.290	98,32%
1.4.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pengadaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri 	49 Stel 51 Stel	49 Stel 51 Stel	100% 100%	67.350.000	64.350.000	95,55%
1.4.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	60 orang	60 orang	100%	81.558.908	81.278.899	99,66%
1.4.3	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah ASN DPMPSTP Yang Mengikuti BIMTEK	12 orang	12 orang	100%	61.318.000	61.073.391	99,60%
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	733.688.309	723.897.724	99,28%
1.5.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	100%	29.040.000	29.038.500	99,99%
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	13 unit	13 unit	100%	93.198.412	88.417.000	94,87%
1.5.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan ▪ Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang Dilakukan 	34 jenis 22 kali	34 jenis 22 kali	100% 100%	29.511.633	29.482.700	99,90%
1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Penyediaan Barang Cetak ▪ Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 	9 jenis 21.358 lbr	9 jenis 21.358 lbr	100% 100%	15.774.962	15.774.750	100%
1.5.5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	6 jenis	6 jenis	100 %	17.080.000	17.080.000	100%
1.5.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ▪ Jumlah Makanan dan Minumanyg Disediakan untuk Pertemuan 	59 dokumen 440 kotak	59 dokumen 440 kotak	100% 100%	549.083.302	548.640.774	99,92%
1.7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAND AERAH	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100%	59.970.700	59.306.800	98,89%
1.7.1	PENGADAAN MEBEL	Jumlah Pengadaan Mebel	17 unit	17 unit	100%	59.970.700	59.306.800	98,89%
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.136.122.501	1.105.283.301	97,29%
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam 1 Tahun	400 surat	600 surat	150%	23.862.934	23.497.300	98,47%

1.8.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Tagihan Listrik yang dibayarkan ▪ Rekening Tagihan Telepon Yang Dibayarkan ▪ Jaringan Internet Yang disediakan 	41500KVA 3 rek 1 paket	41500KVA 3 rek 1 paket	100% 100% 100%	200.024.000	173.793.976	86,89%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan ▪ Jumlah Jasa Tenaga Sopir ▪ Jumlah Jasa Tenaga Pengaman ▪ Jumlah Jasa Rohaniwan 	5 org 5 org 4 org 10 kali	5 org 5 org 4 org 10 kali	100% 100% 100% 100%	912.235.567	908.002.025	99,54%
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100%	100%	100%	551.399.866	384.867.407	99,83%
1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	11 unit	11 unit	100%	269.193.250	268.543.383	99,76%
1.9.2	PEMELIHARAAN MEBEL	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	200 unit	200 unit	100%	16.000.000	15.994.200	99,96%
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain Yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%	220.526.616	220.414.824	99,95%
1.9.4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	96 unit	96 unit	100%	45.680.000	45.515.000	99,64%
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	722.317.000	726.622.092	99,78%
2.1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MOAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal	1 Ranpergub	1 Ranpergub	100%	84.392.700	84.208.500	99,78%
2.1.1	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITASI/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ▪ Tersedianya Kebijakan Penanaman Modal 	80 orang 1 ranpergub	80 orang 1 ranpergub	100% 100%	84.392.000	84.208.500	99,78%
2.2	PEMBUATAN PETA POTENSI PELUANG INVESTASI PROVINSI	Persentase Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi Yang Lengkap	100%	100%	100%	643.924.300	642.413.592	99,77%
2.1.1	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ▪ Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RUPM 	80 orang 1 dokumen	80 orang 1 dokumen	100% 100%	96.341.350	96.297.754	99,95%

2.1.2	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> Data Status Tanah Ulayat yg Berpotensi untuk Penanaman Modal Dokumen Study Kelayakan Proyek Investasi Jumlah Pelaku Usaha yg Bermitra Jumlah Profil Peluang Investasi Sumatera Barat Terlaksananya Pembinaan dan Dukungan terhadap Peta Potensi Terlaksananya Sosialisasi SIMITRA Terlaksananya FKPUD 	1 persil 1 dokuken 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 orang 100 orang	3 persil 1 dokuken 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 orang 100 orang	300% 100% 100% 100% 100%	547.582.950	546.115.638	99,73%
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	4 Perny. Minat	5 Perny. Minat	125%	729.123.550	725.529.302	99,51%
3.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Keikutsertaan DPMPSTP dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 event	1 even	100%	729.123.550	725.529.302	99,51%
3.1.1	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	Tersedianya Materi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	150.000.000	149.935.850	99,96%
3.1.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi di Sumatera Barat Terlaksananya keikutsertaan DPMPSTP dalam Promosi Penanaman Modal Tersebaranya Informasi Penanaman Modal melalui Media Masa 	1 laporan 1 even 4 kali	1 laporan 1 even 4 kali	100% 100% 100%	579.123.550	575.593.452	99,39%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	5,2 T	5,2 T	59,60%	996.522.731	990.288.713	99,37%
4.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	5,2 T	5,2 T	59,60%	996.522.731	990.288.713	99,37%
4.1.1	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Koordinasi penanaman modal	1 laporan	1 laporan	100%	8.840.000	7.671.800	86,79%
4.1.2	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi Permasalahannya Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	10 PMA/ PMDN 450 orang	11 PMA/ PMDN 450 orang	100% 100%	730.295.885	727.468.803	99,61%
4.1.3	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	40 pelaku usaha	70 pelaku usaha	175%	257.386.846	255.148.110	99,13%

5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	20%	100%	100%	53.488.000	53.487.923	100%
5.1	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	20%	100%	100%	53.488.000	53.487.923	100%
5.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Yang Tersedia	1 Dokumrn	1 dokumen	100%	53.488.000	53.487.923	100%
6	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ▪ Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu 	82,60 / 3,40 85%	95,35 / 3,81 85%	115,44/ 112,06 100%	1.467.706.650	1.456.173.663	99,15%
6.1	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ▪ Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu 	82,60 / 3,40 85%	95,35 / 3,81 85%	115,44/ 112,06 100%	1.467.706.650	1.456.173.663	99,21%
6.1.1	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi ▪ Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan ▪ Terlaksananya Forum PTSP ▪ Terlaksananya Koordinasi Teknis PTSP 	1 sistem 2000 izin 85 orang 60 orang	1 sistem 2011 izin 85 orang 60 orang	100% 100% 100% 100%	996.886.100	989.206.501	99,23%
6.1.2	PEMANTAUAN KEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Audit Mutu Pelayanan tahun ke empat ▪ Terfasilitasnya NIB yang Berkomitmen agar Merealisasikan Izinnya ▪ Terlaksananya Survei IKM 	1 kali 1 laporan 2 kali	1 kali 1 laporan 2 kali	100% 100% 100%	177.413.400	177.183.850	99,87%

6.1.3	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terfasilitasinya izin SIPSAKATO yg tidak sesuai dengan SOP ▪ Terfasilitasinya/Termediasinya Pengaduan Izin Yang Bermasalah ▪ Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan 	10 izin 10 pengaduan 1 kali	10 izin 10 pengaduan 1 kali	100% 100% 100%	293.407.150	289.783.312	98,76%
TOTAL						13.362.219.389	12.906.595.628	96,59%

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304131997031001

MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI
IK. 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

CASCADING KINERJA

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
IK. Nilai Akuntabilitas Kinerja OFD

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN ORGANISASI
IK. Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP

MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN ORGANISASI
IK. Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP

MENINGKATNYA PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI
IK. Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

PEMEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN PETA JABATAN
IK. Persentase Pegawai yang Penempatannya sesuai dengan Peta Jabatan

MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DAN KEPERAWAAN
IK. 1. Persentase Layanan Administrasi Keperawatan sesuai SOP
2. Persentase Layanan Surat Menyurat sesuai SOP
3. Persentase Layanan Sesuai SOP

MENINGKATNYA PENGELOLAAN BMD
IK. 1. Persentase BMD dalam Kondisi Baik
2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Pendukung Kinerja

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM ORGANISASI
IK. Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

TERBESUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH TEPAT WAKTU
IK. Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang Ditusun Tepat Waktu

KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
IK. Persentase Dokumen Perangkat Daerah Yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Daerah

MENINGKATNYA IMPELEMENSI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
IK. Persentase Keseluruhan Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran

TERBESUNNYA DOKUMEN LAPORAN ORGANISASI TEPAT WAKTU
IK. Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yang Ditusun Tepat Waktu

MENINGKATNYA KESERJAHAN LAPORAN DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
IK. Persentase Keseluruhan Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan

MENINGKATNYA PEMANFAATAN LAPORAN
IK. Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindak Lanjut Dalam Dokumen Perangkat Daerah

MENINGKATNYA PEMANFAATAN LAPORAN TERHADAP PERENCANAAN DAERAH
IK. Persentase Pengurangan Kesalahan Hasil Verifikasi Keuangan

MENINGKATNYA TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN
IK. Persentase Temuan Pemeriksaan Yang Tindak Lanjut

MENINGKATNYA ASN YANG MENGIKUTI LHKPN/ LKHSN TEPAT WAKTU
IK. Jumlah ASN Yang Mengikuti LHKPN/ LKHSN Tepat Waktu

KEPERSEDIAAN DATA KEPERAWAAN YANG AKURAT
IK. Persentase Ketersediaan Data Keperawatan

TERBESUNNYA URAIAN TUGAS ASN SESUAI DENGAN REGULASI
IK. Dokumen Uraian Tugas Yang Sesuai dengan Regulasi

KEPERSEDIAAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN dan PETA JABATAN YANG SESUAI DENGAN REGULASI
IK. 1. Dokumen Anjals sesuai ds regulasi
2. Dokumen Peta Jabatan yg sesuai ds regulasi

TERBESUNNYA DOKUMEN SOP DENGAN REGULASI
IK. Dokumen SOP Yang Sesuai Dengan Regulasi

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PEMERIKSA
IK. Jumlah SDM layanan yang kompeten

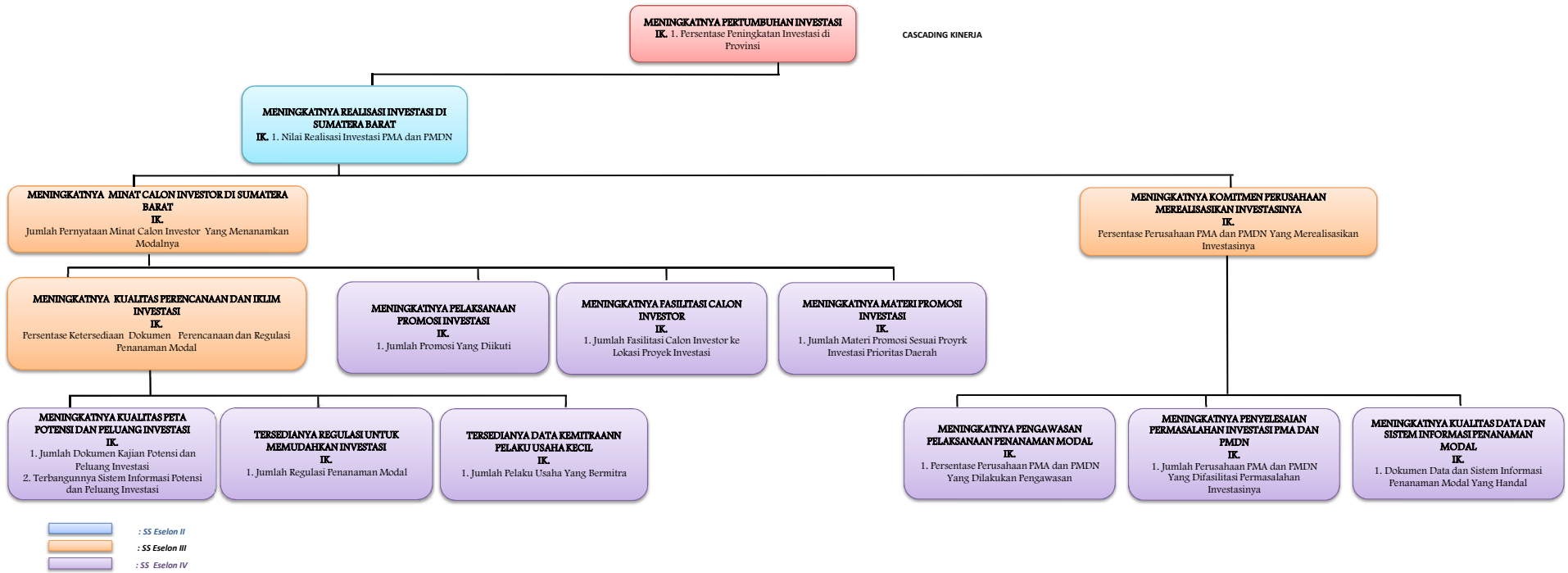
MENINGKATNYA BMD YANG DIDADAKAN DAN DIPELIHARA
IK. 1. Jumlah Aset Yang Didadakan Yang
2. Jumlah Aset Yang Dipelihara
3. Persentase Aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

MENINGKATNYA PENGAMALAN BMD SESUAI REGULASI
IK. 1. Persentase Aset Yang Sudah Diinventarisir
2. Persentase Data Aset Yang Sudah Didכון
3. Persentase Aset Yang Sudah Diinventarisir

TERBESUNNYA DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
IK. Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

TERBESUNNYA RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN II KAPASITAS SDM
IK. Dokumen Rencana Kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

- : SS Eselon II
- : SS Eselon III
- : SS Eselon IV



|

